

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

**untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Memeriksa
Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024
dan
Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024
perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024**

Diajukan oleh:

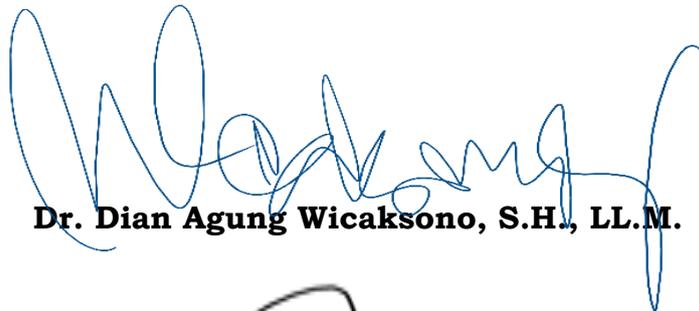
ALIANSI AKADEMISI DAN MASYARAKAT SIPIL

TIM PERUMUS

Bertanda tangan di bawah ini merupakan Perumus *Amicus Brief* ini:



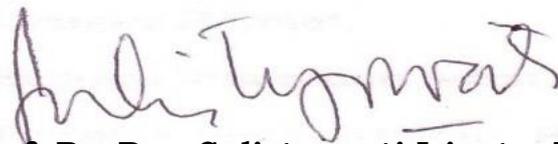
Dr. Benedictus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.



Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.



Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.



Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.



Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 3 |
| PENGANTAR..... | 4 |
| TUJUAN | 5 |
| RUMUSAN PERTANYAAN | 6 |
| IDENTITAS DAN KEPENTINGAN | 7 |
| RINGKASAN PENDAPAT | 9 |
| PENDAPAT <i>AMICUS</i> : MEMAKNAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PUTUSAN PLURALITAS..... | 10 |
| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... | 17 |
| LAMPIRAN..... | 18 |

PENGANTAR

Dalam waktu singkat, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia yang selama ini dipuji dunia sebagai negara hukum dan demokrasi, yang mampu merawat keragaman, dipandang sudah berubah menjadi negara kekuasaan. Persoalan utama Pemilu 2024 adalah munculnya netralitas palsu dan kecurangan yang diperlihatkan secara terang benderang justru oleh penyelenggara negara, yang menurut konstitusi merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya berdiri di atas semua golongan, dan memiliki semua hak dan kewenangan untuk dapat menjalankan tugasnya.

Namun, dalam proses Pemilu tampak bahwa penyelenggara negara telah melakukan rekayasa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), memobilisasi kekuatan aparatur birokrasi negara, dan menggunakan sumber dana tanpa batas untuk melakukan politik uang dan politik gentong babi. Kecurangan masif dimulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu kepada publik bahwa semua proses pemilu berjalan wajar tanpa pelanggaran hukum. Namun, sebenarnya keruntuhan demokrasi dan supremasi hukum sedang terjadi, dan membahayakan kohesi masyarakat.

TUJUAN

Tujuan *Amicus Curiae* untuk Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah:

1. Mendukung Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan yang mengakomodasi pengalaman dan realitas masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Pemilu 2024, yang sejak dari proses, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya tidak mengindahkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan etika moral.
2. Mendukung Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat membuat pertimbangan yang memandang demokrasi yang diusung dalam Pemilu tidak hanya sebatas angka-angka statistik, tetapi melihat Pemilu sebagai suatu proses, di mana pihak yang tidak mengindahkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah justru penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, yang meruntuhkan kepercayaan publik.
3. Mendukung hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat membuat putusan yang dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap keberadaan Republik Indonesia sebagai negarai hukum, memulihkan proses demokrasi yang cedera sepanjang proses Pemilu, menjunjung tinggi etika dan standar moral yang seharusnya dihormati dalam penyelenggaraan Pemilu, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memulihkan rasa keadilan kepada warga negara yang terdampak Pemilu 2024.

RUMUSAN PERTANYAAN

Apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memaknai secara tepat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penetapan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2?

IDENTITAS DAN KEPENTINGAN

Bahwa kedudukan *Amicus Curiae* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tengah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi telah diakomodasi dalam Pasal 38 huruf e *jo.* Pasal 44 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2023) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38:

Alat bukti berupa: [...] e. keterangan pihak lain;

Pasal 44:

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Berdasarkan kesempatan yang dibuka tersebut, *Amicus Brief* ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik sekaligus sarana penyalur aspirasi terhadap proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Kami yang bersepakat terhadap substansi *Amicus Brief* ini (daftar nama terlampir) adalah akademisi yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia, yang bergandengan tangan dengan masyarakat sipil dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama.

Pada dasarnya *Amicus Brief* ini disusun dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil

sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali.” Keberadaan frasa “jujur” dan “adil” dalam ketentuan *a quo* tidak semata hanya dimaknai sekadar prinsip penyelenggaraan Pemilu, namun juga penting dimaknai sebagai sebuah ekspektasi yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945 atas penyelenggaraan Pemilu. Singkatnya, ketika Pemilu diselenggarakan secara tidak jujur dan tidak adil, maka *mutatis mutandis* Pemilu yang diselenggarakan tersebut menjadi inkonstitusional. Dengan demikian, perkara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini memiliki arti penting dan sekaligus merupakan momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan mandat UUD NRI Tahun 1945 dan menjaga marwah demokrasi Indonesia.

RINGKASAN PENDAPAT

Bahwa KPU telah salah memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan pluralitas dalam menetapkan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Putusan Pluralitas merupakan putusan yang diambil tanpa adanya suara mayoritas karena terdapatnya perbedaan dalam pertimbangan hukum dan/atau amar putusan. Dalam hal terdapat putusan pluralitas, pendirian Mahkamah Konstitusi harus dilihat dalam pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang disetujui oleh mayoritas hakim dalam lingkup yang paling sempit (*the narrowest ground rule*) sebagaimana telah lazim dalam praktik peradilan di Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membaca suatu putusan pluralitas yang dapat ditemukan dalam Putusan *Marks v. United States (1977)* atau yang dikenal dengan *Marks Rule*. Dengan mengacu pada aturan tersebut, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya dimaknai bahwa perluasan jabatan yang secara implisit disetujui oleh mayoritas anggota majelis, baik pluralitas dan *concurring*, adalah gubernur saja. Dengan kata lain, seharusnya KPU sedari awal tidak menetapkan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ketika tahap pencalonan masih berstatus sebagai walikota.

Mengingat preseden Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memutuskan diskualifikasi pasangan calon karena tidak dipenuhinya kualifikasi dalam tahap pencalonan, serta Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan masuknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim Pemilu, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai konsekuensi atas tidak terpenuhinya kualifikasi sebagai calon wakil presiden oleh Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2.

PENDAPAT AMICUS:
MEMAKNAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI PUTUSAN PLURALITAS

1. Bahwa pertama-tama terlebih dahulu perlu mendudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai sebuah hal baru dalam praktik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kebaruan tersebut terletak pada pengambilan putusan dalam Putusan *a quo*. Tepatnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak terdapat suara mayoritas yang mendasari amar putusan dengan 3 (tiga) hakim menulis pendapat pluralitas (*plurality opinion*),¹ 2 (dua) hakim masing-masing memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), dan 4 (empat) hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Singkatnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pluralitas (*plurality decision*), yaitu suatu putusan yang diambil tanpa adanya mayoritas hakim yang mendukung satu pertimbangan hukum yang sama.²
2. Bahwa bila merujuk ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU 24/2003 menegaskan bahwasanya “*Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.*” Berdasarkan ketentuan *a quo*, dengan komposisi 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, maka sudah seharusnya putusan diambil dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang hakim konstitusi yang kemudian menyetujui amar putusan yang sama, kendatipun

¹ Pendapat pluralitas merupakan pendapat yang memperoleh suara terbanyak, namun tidak mayoritas dari jumlah anggota majelis yang memeriksa perkara. Adam S. Hochschild, “The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective.” *Wash. UJL & Pol’y* 4 (2000): 261.

² James F. Spriggs, “Explaining Plurality Decisions.” *Geo. LJ* 99 (2010): 517.

kemudian terdapat perbedaan pertimbangan hukum di antara anggota majelis yang menyetujui amar putusan tersebut.

3. Bahwa secara komparatif, dalam praktik di Mahkamah Agung Amerika Serikat telah dikenal cara untuk membaca suatu putusan pluralitas. Adapun cara membaca tersebut dapat ditemukan dalam Putusan *Marks v. United States* (1977). Dalam Putusan *Marks*, Hakim Lewis F. Powell menulis untuk pendapat mayoritas menyatakan bahwa, “ketika suatu Pengadilan terpecah dalam memutuskan suatu kasus dan tidak ada satu pun pertimbangan hukum atas amar putusan yang mendapat persetujuan dari lima Hakim, “[maka] pendirian [atau putusan] Pengadilan dapat dipandang dalam posisi yang diambil oleh anggota majelis yang setuju dalam mengambil amar putusan atas dasar yang paling sempit.”³ Singkatnya, dalam hal tidak terdapat pendapat mayoritas, maka pendapat yang paling sempit yang menyetujui putusan adalah pendapat yang bersifat mengikat, sehingga *Marks Rule* kemudian dikenal juga sebagai *the narrowest ground rule*.⁴
4. Bahwa masing-masing pendapat pluralitas (*plurality opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi sebagai berikut:

| No. | Pendapat | Amar |
|-----|---|--|
| 1. | Pluralitas (Anwar Usman, Guntur M. Hamzah, Manahan M.P. Sitompul) | “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah ” |
| 2. | Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Enny Nurbaningsih) | “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang” |

³ *Marks v. United States*, 430 U.S. 188 (1977).

⁴ John P. Neuenkirchen, “Plurality Decisions, Implicit Consensuses, and the Fifth-Vote Rule under *Marks v. United States*.” *Widener L. Rev.* 19 (2013): 387.

| No. | Pendapat | Amar |
|-----|---|--|
| 3. | Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Daniel Yusmic P. Foekh) | “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi ” |

Mencermati tabel di atas, sejatinya tidak hanya terdapat perbedaan pertimbangan hukum, melainkan juga bunyi “amar” putusan. Dengan demikian, *concurring opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipahami dengan pengertian *concurring opinion* sebagaimana lazim dipahami. Tepatnya, letak perbedaan antara pendapat mayoritas/pluralitas dengan *concurring opinion* hanya terletak pada pertimbangan hukumnya, bukan amar putusan.⁵ Menjadi pertanyaan bagaimana kemudian memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ketika terdapat tidak hanya perbedaan pertimbangan hukum, melainkan juga perbedaan bunyi amar antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion*?

5. Bahwa terkait dengan perbedaan bunyi amar, terdapat pendekatan hasil (*results approach*) dalam menerapkan *the narrowest ground rule*. Dalam *results approach* akan dilihat hasil/amar putusan yang paling sempit di antara pendapat yang menentukan.⁶ Dengan kata lain, bila kemudian di antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion* terdapat perbedaan mengenai seberapa luas amar putusan, maka yang mengikat adalah amar putusan yang paling sempit. Hal ini mengingat amar putusan yang paling sempit tersebut secara implisit disetujui oleh mayoritas hakim.⁷
6. Bahwa dari pemetaan dalam poin nomor 4, sejatinya antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion* sama-sama memiliki

⁵ Charles C. Turner, Lori Beth Way, and Nancy Maveety. "Beginning to Write Separately: The Origins and Development of Concurring Judicial Opinions." *Journal of Supreme Court History* 35, no. 2 (2010): 94.

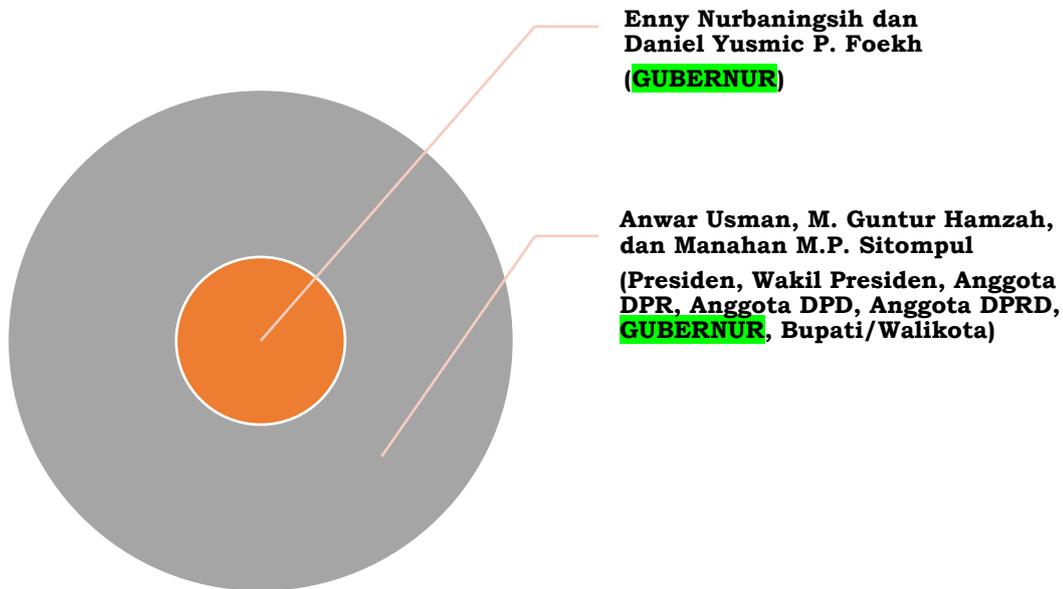
⁶ Kevin M. Lewis, *What Happens when Five Supreme Court Justices Can't Agree?*. Congressional Research Service, 2018.

⁷ John P. Neuenkirchen, *Op.Cit.* 397.

pendirian untuk setuju memperluas persyaratan calon wakil presiden dan/atau wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan menambahkan syarat jabatan yang dapat disepadankan. Meski demikian, perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan terhadap jenis jabatan apa saja yang disepadankan sebagai syarat pencalonan sebagai berikut:

| No. | Pendapat | Perluasan Makna Pasal 169 huruf q UU 7/2017 | | |
|-----|--|--|---------------------------|---|
| | | Gubernur | Bupati/ Walikota | Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan/atau DPRD |
| 1. | Pluralitas (Anwar Usman) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pluralitas (Guntur M. Hamzah) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pluralitas (Manahan M.P. Sitompul) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Enny Nurbaningsih) | ✓ | | |
| 3. | Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Daniel Yusmic P. Foekh) | ✓ | | |
| | Jumlah | 5 hakim setuju | 3 hakim setuju | 3 hakim setuju |

Berdasarkan tabel di atas, hanya jabatan Gubernur saja yang disetujui oleh mayoritas anggota majelis. Bila digambarkan dalam bagan, komposisi pendapat anggota majelis yang menulis *plurality opinion* dan *concurring opinion* adalah sebagai berikut:



Dengan demikian, bila membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan kacamata *the narrowest ground rule*, maka perluasan makna Pasal 169 huruf q UU 7/2017 harus dibaca “**memperluas persyaratan pencalonan HANYA UNTUK YANG BERPENGALAMAN SEBAGAI GUBERNUR.**”

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, maka penetapan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1632/2023) adalah bertentangan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana seharusnya dimaknai berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini mengingat, ketika tahap pencalonan, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 masih menjabat sebagai Walikota dan sama sekali belum pernah menduduki jabatan Gubernur, sehingga menjadikan Calon

Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

8. Bahwa perihal calon yang tidak memenuhi syarat dalam PHPU, sejatinya telah terdapat preseden di Mahkamah Konstitusi yang kemudian mendiskualifikasi pasangan calon sebagai berikut:

| No. | Putusan | Alasan Diskualifikasi | Amar |
|-----|--|---|--------------------------------------|
| 1. | 45/PHPU.D-VIII/2010 (Kab. Kotawaringin Barat) | Adanya pelanggaran sangat serius (<i>money politic</i> , intimidasi pemilih dan kepala desa, keberpihakan penyelenggara sebagai relawan, dlsb.) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan pemelukada yang luberjurdil. | Diskualifikasi Pasangan Calon |
| 2. | 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Boven Digoel) | Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati → belum melewati masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 | Diskualifikasi Pasangan Calon |
| 3. | 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sabu Raijua) | Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati → masih berstatus warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon. | Diskualifikasi Pasangan Calon |
| 4. | 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo) | Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati → dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara pada saat berstatus sebagai calon. | Diskualifikasi Pasangan Calon |

Bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon, yaitu: **Pertama**, dalam hal terdapat pelanggaran sangat serius yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu; dan **Kedua**, dalam hal salah satu calon tidak memenuhi syarat pencalonan.

9. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kedudukan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan preseden-preseden dalam PHPKada sebagai dasar dalam memutus PHPU ini. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Boven Digoel), Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sabu Raijua), dan 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo) untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai konsekuensi atas tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Pasal 169 huruf q sebagaimana pemaknaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kaca mata *the narrowest ground rule*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa KPU telah salah memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan pluralitas dalam menetapkan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Bahwa kesalahan KPU dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyebabkan penetapan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Keputusan KPU 1632/2023 adalah perbuatan yang batal demi hukum (*null and void*) karena Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak awal tidak memenuhi persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperluas persyaratan pencalonan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 hanya untuk yang berpengalaman sebagai gubernur.
3. Bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden, seharusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi dengan segala kebijaksanaannya tidak ragu untuk menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana preseden pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya yang secara tegas mendiskualifikasi pasangan calon dalam hal pasangan calon tidak memenuhi syarat pencalonan.

Hakim adalah penjaga gerbang keadilan di dunia ini, tempat agung bagi pencari keadilan dan warga masyarakat luas yang datang berseru-seru, mengharapkan terobosan hukum diciptakan, dan hukum tertinggi dilahirkan, yaitu keadilan bagi mereka yang lemah dan tanpa kuasa.

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA AMICIS

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|-----|---------------------------|--|-----------|
| 1. | Vania Budianto | Australian National University (ANU) | Akademisi |
| 2. | Bambang Kesowo | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Akademisi |
| 3. | Alexander Jebaru | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | Akademisi |
| 4. | Bernardus Hayong | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | Akademisi |
| 5. | Felix Baghi | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | Akademisi |
| 6. | Hendrikus Maku | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | Akademisi |
| 7. | Otto Gusti Ndegong Madung | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | Akademisi |
| 8. | Damayanti Buchori | Institut Pertanian Bogor | Akademisi |
| 9. | Hania Rahma | Institut Pertanian Bogor | Akademisi |
| 10. | Hariadi Kartodihardjo | Institut Pertanian Bogor | Akademisi |
| 11. | Meilanie Buitenzorgy | Institut Pertanian Bogor | Akademisi |
| 12. | Hendy Hertiasa | Institut Teknologi Bandung | Akademisi |
| 13. | Premana W. Premadi | Institut Teknologi Bandung | Akademisi |
| 14. | Sangriyadi Setio | Institut Teknologi Bandung | Akademisi |
| 15. | Ratna Saptari | Leiden University | Akademisi |
| 16. | Vera W.S. Soemarwi | Leiden University | Akademisi |
| 17. | Gita Putri Damayana | Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera | Akademisi |
| 18. | Yunus Husein | Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera | Akademisi |
| 19. | Agus Salim | STAI Imam Bonjol Padang Panjang | Akademisi |
| 20. | Hanan Wihasto | STEI Yogyakarta | Akademisi |
| 21. | Hamzah Jamaludin | STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi | Akademisi |
| 22. | Adji | STPMD APMD | Akademisi |
| 23. | Fatih Gama Abisono N. | STPMD APMD | Akademisi |
| 24. | Nurbahrin Hadi | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Akademisi |
| 25. | Tomy Michael | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Akademisi |
| 26. | Muhammad Farid Alwajdi | Universitas Ahmad Dahlan | Akademisi |
| 27. | Airlangga Pribadi Kusman | Universitas Airlangga | Akademisi |
| 28. | Bernardus Dody Widhiarto | Universitas Airlangga | Akademisi |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 29. | Eko Budi Koendhori | Universitas Airlangga | Akademisi |
| 30. | Irfa Puspitasari | Universitas Airlangga | Akademisi |
| 31. | Akhmad Safik | Universitas Al Azhar Indonesia | Akademisi |
| 32. | Satya Gayatri | Universitas Andalas | Akademisi |
| 33. | Akhmad Suraji | Universitas Andalas | Akademisi |
| 34. | Armansyah | Universitas Andalas | Akademisi |
| 35. | Gusnidar | Universitas Andalas | Akademisi |
| 36. | Hasmiwati | Universitas Andalas | Akademisi |
| 37. | Nilma Suryani | Universitas Andalas | Akademisi |
| 38. | Zulfi | Universitas Andalas | Akademisi |
| 39. | A. Mugiyono | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 40. | Benediktus Hestu Cipto Handoyo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 41. | Ignasius Sumarsono Raharjo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 42. | Lukas S. Ispandriarno | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 43. | Y. Sri Susilo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 44. | Yohanes Hartono | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Akademisi |
| 45. | Titiek Kartika Hendrastiti | Universitas Bengkulu | Akademisi |
| 46. | Dhia Al Uyun | Universitas Brawijaya | Akademisi |
| 47. | Helmi Chandra SY | Universitas Bung Hatta | Akademisi |
| 48. | Hilman Haroen | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | Akademisi |
| 49. | Akhmad Syakir Kurnia | Universitas Diponegoro | Akademisi |
| 50. | FX Sugiyanto | Universitas Diponegoro | Akademisi |
| 51. | Muhammad Nur | Universitas Diponegoro | Akademisi |
| 52. | Adrianto Dwi Nugroho | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 53. | Agus Wahyudi | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 54. | Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 55. | Almonika Cindy Fatika Sari | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 56. | Ananda Prima Yurista | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 57. | Andreas Budi Widyanta | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 58. | Arvie Johan | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 59. | Bambang Hudayana | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 60. | Budi Setiadi Daryono | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 61. | Catur Sugiyanto | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 62. | Destri Budi Nugrahani | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 63. | Dian Agung Wicaksono | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 64. | Diasma Sandi Swandaru | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 65. | Dina Fitriana Rosyada | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 66. | Faiz Rahman | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 67. | Faiz Zamzami | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 68. | Fajri Matahati Muhammadin | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 69. | Gabriel Lele | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 70. | Galuh Bahari | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 71. | Gumilang Aryo Sahadewo | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 72. | Harry Supriyono | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 73. | Hendry Julian Noor | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 74. | Heribertus Jaka Triyana | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 75. | Heru Marwata | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 76. | I Gusti Ngurah Putra | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 77. | Khotibul Umam | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 78. | Koentjoro | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 79. | Linda Yanti Sulistiawati | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 80. | M. Mansyur Romi | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 81. | Marcus Priyo Gunarto | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 82. | Masthuriyah Sa'dan | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 83. | Muhammad Fatahillah Akbar | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 84. | Nindyo Pramono | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 85. | Nurhasan Ismail | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 86. | Purwo Santoso | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 87. | Rahmat Hidayat | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 88. | Raras Cahyafitri | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 89. | Riris Andono Ahmad | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 90. | Sartika Intaning Pradhani | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 91. | Suharko | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 92. | Suharman | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 93. | Suwarno Hadisusanto | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 94. | Tapiheru Joash Elishe Stephen | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 95. | Totok Dwi Diantoro | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 96. | Umar Mubdi | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 97. | Wahyudi Kumorotomo | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 98. | Wahyu Yun Santoso | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 99. | Winarto | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 100. | Wuri Handayani | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 101. | Yudistira Hendra Permana | Universitas Gadjah Mada | Akademisi |
| 102. | Edi Fakhri | Universitas Gunadarma | Akademisi |
| 103. | Syamsul Anam | Universitas Halu Oleo | Akademisi |
| 104. | Agnes Sri Poerbasari | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 105. | Anton Hermanto Gunawan | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 106. | Emmy Lumbsn Rsja | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 107. | Gandjar Laksmana B. | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 108. | Harkristuti Harkrisnowo | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 109. | Indang Trihandini | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 110. | Indra Gunawan | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 111. | Ismail Hadisoebroto Dilogo | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 112. | Iva Kasuma | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 113. | Manneke Budiman | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 114. | Mayling Oey | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 115. | Melani Budianta | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 116. | Meuthia Ganie-Rochman | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 117. | Multamia RMT Lauder | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 118. | Raden Edi | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 119. | Rosari Saleh | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 120. | Sulistiyowati Irianto | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 121. | Suluh Dwi atmodjo | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 122. | Suzie Sudarman | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 123. | Teguh Kurniawan | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 124. | Yunita Triwardani Winarto | Universitas Indonesia | Akademisi |
| 125. | Rosinta Hutauruk | Universitas Indonesia Mandiri | Akademisi |
| 126. | Akhyaroni Fu'adah | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 127. | Despan Heryansyah | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|------------------------------|--|--------------|
| 128. | Dekar Urumsah | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 129. | Fathul Wahid | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 130. | Fitri Ayu Kusumaningrum | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 131. | Junaidi Safitri | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 132. | M. Syaf'ie | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 133. | Mukmin Zakie | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 134. | Nurfauziah | Universitas Islam Indonesia | Akademisi |
| 135. | Miftah Faried Hadinatha | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Akademisi |
| 136. | Achmad Uzair | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Akademisi |
| 137. | Ali Imron | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Akademisi |
| 138. | Andri Rosadi | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Akademisi |
| 139. | Khamim Zarkasih Putro | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Akademisi |
| 140. | Miko Kamal | Universitas Islam Sumatera Barat | Akademisi |
| 141. | Dominicus Rato | Universitas Jember | Akademisi |
| 142. | Ahmad Sabiq | Universitas Jenderal Soedirman | Akademisi |
| 143. | Hariyadi | Universitas Jenderal Soedirman | Akademisi |
| 144. | Hibnu Nugroho | Universitas Jenderal Soedirman | Akademisi |
| 145. | Rizayusmanda | Universitas Kader Bangsa Palembang | Akademisi |
| 146. | Irwanto | Universitas Katolik Atmajaya Jakarta | Akademisi |
| 147. | Maggy Thenawidjaja Suhartono | Universitas Katolik Atmajaya Jakarta | Akademisi |
| 148. | M. Djanib Achmad | Universitas Khairun | Akademisi |
| 149. | Suwari Akhmaddhian | Universitas Kuningan | Akademisi |
| 150. | Ari Darmastuti | Universitas Lampung | Akademisi |
| 151. | Hieronymus Soerjatisnanta | Universitas Lampung | Akademisi |
| 152. | Al Chaidar Abdurrahman Puteh | Universitas Malikussaleh | Akademisi |
| 153. | Nanda Amalia | Universitas Malikussaleh | Akademisi |
| 154. | Marlia Sastro | Universitas Malikussaleh | Akademisi |
| 155. | Rumzi Samin | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Akademisi |
| 156. | Haruni Ode | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Akademisi |
| 157. | Wiwik Laela Mukromin | Universitas Muhammadiyah Makassar | Akademisi |
| 158. | Wendra Yunaldi | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Akademisi |
| 159. | Yazrul Anuar | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Akademisi |
| 160. | Fauzan Saleh | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Akademisi |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 161. | Satria Unggul Wicaksana Prakasa | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Akademisi |
| 162. | Eko Setiawan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Akademisi |
| 163. | David Efendi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akademisi |
| 164. | Ridho Al-Hamdi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akademisi |
| 165. | Esti Handayani Hardi | Universitas Mulawarman | Akademisi |
| 166. | Herdiansyah Hamzah | Universitas Mulawarman | Akademisi |
| 167. | Safarni Husain | Universitas Mulawarman | Akademisi |
| 168. | Hidayatullah | Universitas Muria Kudus | Akademisi |
| 169. | Basuki Rekso Wibowo | Universitas Nasional | Akademisi |
| 170. | Ummu Salamah | Universitas Nasional | Akademisi |
| 171. | Sjenny Anggraeni Indrawati | Universitas Negeri Jakarta | Akademisi |
| 172. | Ubedilah Badrun | Universitas Negeri Jakarta | Akademisi |
| 173. | Dhoni Zustiyanoro | Universitas Negeri Semarang | Akademisi |
| 174. | Joko Sumiyanto | Universitas Negeri Yogyakarta | Akademisi |
| 175. | Selly Riawanti | Universitas Padjadjaran | Akademisi |
| 176. | Maman | Universitas Pasundan | Akademisi |
| 177. | Achmad Reza Lampung | Universitas Pattimura | Akademisi |
| 178. | Wahyu Nugroho | Universitas Sahid | Akademisi |
| 179. | A. Budisusila | Universitas Sanata Dharma | Akademisi |
| 180. | Junaidi | Universitas Sjakhyakirti Palembang | Akademisi |
| 181. | Suhana | Universitas Stikubank Semarang | Akademisi |
| 182. | Ningrum Natasya Sirait | Universitas Sumatera Utara | Akademisi |
| 183. | Saifuddin Bantasyam | Universitas Syiah Kuala | Akademisi |
| 184. | Saiful Mahdi | Universitas Syiah Kuala | Akademisi |
| 185. | Else Suhaimi | Universitas Tamansiswa Palembang | Akademisi |
| 186. | Martadani Noor | Universitas Widya Mataram | Akademisi |
| 187. | Purnawan D. Negara | Universitas Widyagama Malang | Akademisi |
| 188. | Soleh Hadisutisna | Universitas Wiralodra | Akademisi |
| 189. | Shintia D. Arwida | University of British Columbia | Akademisi |
| 190. | Rachmad Safa'at | Unuversitas Brawijaya | Akademisi |
| 191. | Zulfan Tadjoeddin | Western Sydney University | Akademisi |
| 192. | Masduki | Forum Cik Ditiro | Masyarakat Sipil |
| 193. | Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin | Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika | Masyarakat Sipil |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|------------------------|--|------------------|
| 194. | Eko Suryawan | Aliansi Rakyat Menggugat | Masyarakat Sipil |
| 195. | Dody Soesetyo | Aliansi Rakyat Menggugat | Masyarakat Sipil |
| 196. | Jubaidah | Aliansi Rakyat Menggugat | Masyarakat Sipil |
| 197. | Yunus Anies | Aliansi Rakyat Menggugat | Masyarakat Sipil |
| 198. | Tanty Magdalena | Alumni FSUI | Masyarakat Sipil |
| 199. | Jeni Suryanti | Alumni SMA Jakarta Bersatu | Masyarakat Sipil |
| 200. | Endro Soe | Alumni UI Garda Pancasila | Masyarakat Sipil |
| 201. | Endy Effendie | Alumni Universitas Airlangga | Masyarakat Sipil |
| 202. | Dwi Rubiyanti Kholifah | AMAN Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 203. | R. Benjamin Lukman | Amanah Properti Syariah Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 204. | Usman Hamid | Amnesty International Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 205. | Andy Reza | Assosiation of Resilliency Movement Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 206. | Yuniarti | Biro Konsultasi Psikologi Hijau | Masyarakat Sipil |
| 207. | Syahrifuddin | BRAVOGUARD Makassar | Masyarakat Sipil |
| 208. | Fitri Putjuk | Cisanggiri Cyndicate | Masyarakat Sipil |
| 209. | Ririn Sefsani | Commitment for Change KouP | Masyarakat Sipil |
| 210. | Arif Supriyono | Dewan Pers | Masyarakat Sipil |
| 211. | Zainab Zubaidi | Diaspora Indonesia di Nouakchott Mauritania Afrika Utara | Masyarakat Sipil |
| 212. | Hindharyoen NTS | Eks Jurnalis Harian Umum Kompas Jakarta | Masyarakat Sipil |
| 213. | Sidi Alkahfi Setiawan | Forum Aktivist Pergerakan Jember | Masyarakat Sipil |
| 214. | Rudi S. Kamri | Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi | Masyarakat Sipil |
| 215. | Aprian J. Bahtiar | Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera | Masyarakat Sipil |
| 216. | Nong Darol Mahmada | Freedom Institute | Masyarakat Sipil |
| 217. | Bambang Praswanto | Front Marhaenis Yogyakarta | Masyarakat Sipil |
| 218. | Sri Muryani | Garnas Indonesia Gemilang | Masyarakat Sipil |
| 219. | Dolfis Tasane | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 220. | M. Ikhsan | Gerakan Masyarakat Jakarta Raya | Masyarakat Sipil |
| 221. | Andi Syahputra | Government Watch (GOWA) | Masyarakat Sipil |
| 222. | R. Agus Awaludin S. | Grha Putih | Masyarakat Sipil |
| 223. | Moh Iqbal | Himpunan Mahasiswa Islam | Masyarakat Sipil |
| 224. | Diana Leli Indratno | ICMI Orda Sleman | Masyarakat Sipil |
| 225. | Siti Muniroh | Indemo | Masyarakat Sipil |
| 226. | Deviyanti | Indonesia Gemilang | Masyarakat Sipil |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|----------------------------|--|------------------|
| 227. | Dadang Trisasongko | Indonesia Legal Resource Centre | Masyarakat Sipil |
| 228. | Asrianty Purwantinj | Indonesian Democracy Monitoring (InDEMO) | Masyarakat Sipil |
| 229. | Mohamad Miqdad | Institut Titian Perdamaian | Masyarakat Sipil |
| 230. | Ahmad Maruf | Institute of Public Policy and Economic Studies | Masyarakat Sipil |
| 231. | Rusdi Marpaung | Jaga Pemilu Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 232. | Moch Riza Zaenal Abidin | Jala Samudera Mandiri | Masyarakat Sipil |
| 233. | Hasni JU | Jari Aceh | Masyarakat Sipil |
| 234. | Idha Marlina | Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu | Masyarakat Sipil |
| 235. | Iwan Samariansyah | Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu | Masyarakat Sipil |
| 236. | Jasmani | Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu | Masyarakat Sipil |
| 237. | Imam Sujangi | JARNAS/KAHMI | Masyarakat Sipil |
| 238. | Tony Permana S. | JASMA 68 | Masyarakat Sipil |
| 239. | Julia Rohadi | JASMA Jakarta | Masyarakat Sipil |
| 240. | Farouk | Jemari Sakato | Masyarakat Sipil |
| 241. | Heygel The Rome H. | Kalyanamitra | Masyarakat Sipil |
| 242. | Julisti | Kantor Hukum Julisti Anwar dan Rekan | Masyarakat Sipil |
| 243. | Zarya Nugroho | KAP Nugroho & Rekan | Masyarakat Sipil |
| 244. | Joachim Dwiheru Jokoarinto | Kelompok Studi dan Bantuan Hukum | Masyarakat Sipil |
| 245. | Arief Prihantoro | Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada | Masyarakat Sipil |
| 246. | Erry Riyana Hardjapamekas | Koalisi Anti Korupsi Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 247. | Mike Verawati Tangka | Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi | Masyarakat Sipil |
| 248. | Kaka Suminta | Komite Independen Pemantau Pemilu | Masyarakat Sipil |
| 249. | Tito Roesbandi | Komite Peduli Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 250. | Jeirry Sumampow | Komite Pemilih Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 251. | Suta Widhya | Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil | Masyarakat Sipil |
| 252. | Suhartono | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) DIY | Masyarakat Sipil |
| 253. | Azriana | LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan - Aceh | Masyarakat Sipil |
| 254. | Rizal Hakiki | Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat | Masyarakat Sipil |
| 255. | Myra Diarsi | Lembaga Gerak Pemberdayaan | Masyarakat Sipil |
| 256. | Sis Setyobudi | Lembaga Gerak Pemberdayaan | Masyarakat Sipil |
| 257. | Linda Hoemar Abidin | Lembaga Koalisi Seni | Masyarakat Sipil |
| 258. | Zakiah Balahmar | Lembaga Perlindungan Konsumen | Masyarakat Sipil |
| 259. | Sudar Atmanto | LP3ES Jakarta | Masyarakat Sipil |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|------------------------------------|---|------------------|
| 260. | Farid Bambang Siswantoro | Muhammadiyah Wilayah DIY | Masyarakat Sipil |
| 261. | Yunita Djalinus | Patriot Nusantara Pejuang Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 262. | Ahmad Sahwiton | Pemilihan Umum 2024 | Masyarakat Sipil |
| 263. | Yoab Lengket | Pengurus Dewan Adat Dayak Kab Melawi | Masyarakat Sipil |
| 264. | Wahyu Susilo | Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat | Masyarakat Sipil |
| 265. | Yuliani | Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan | Masyarakat Sipil |
| 266. | Ahmadie Thaha | Persatuan Ummat Islam (PUI) | Masyarakat Sipil |
| 267. | Ismail Lutan | Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) | Masyarakat Sipil |
| 268. | Saut Situmorang | Pimpinan KPK 2015-2019 | Masyarakat Sipil |
| 269. | A. Budianto | Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 270. | Firman Tendry Masengi | Presidium Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 271. | Nuryadin Hulukati | Pusat Kajian dan Advokasi Rakyat (PATAKA) Sulawesi Tengah | Masyarakat Sipil |
| 272. | Sugeng Widodo | RAJUT Banjarnegara | Masyarakat Sipil |
| 273. | Samsidar | Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan | Masyarakat Sipil |
| 274. | Ita Fatia Nadia | Ruang Arsip dan Sejarah (RUAS) | Masyarakat Sipil |
| 275. | Octalya Puspa Wardany | Rumah Produksi untuk Kebudayaan Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 276. | Gatot Subroto | Rumah Sakit Islam Tunas Harapan Salatiga | Masyarakat Sipil |
| 277. | Maria Bernadette Damairia Pakpahan | Rumpun Tjoet Nyak Dien Yogyakarta | Masyarakat Sipil |
| 278. | Muhammad Mustafid | Saqifa Institute for Ecosoc Rights | Masyarakat Sipil |
| 279. | Suhartinah | Satrio Pamungkas | Masyarakat Sipil |
| 280. | FachriRoveny | Semangat Baru Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 281. | Sanaulaili | SP Kinasih | Masyarakat Sipil |
| 282. | M. Imam Aziz | Syarikat Indonesia Yogyakarta | Masyarakat Sipil |
| 283. | Natalia Soebagio | Transparency International Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 284. | Rahmawati Retno Winarni | TuK Indonesia | Masyarakat Sipil |
| 285. | Farida Rianti | UMKM Ketozen | Masyarakat Sipil |
| 286. | Alfa Camrilla | Wanita Cerdas dan Tangguh | Masyarakat Sipil |
| 287. | Daisyta Mega Sari | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 288. | Dionisius Anas R. Alexander | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 289. | FX Hari Witono | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 290. | Garuda Era Ruhpinesthi | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 291. | Khujairi | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 292. | Lilik A. Widyaatuti | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |

| No. | Nama Lengkap | Asal Institusi | Unsur |
|------------|---------------------------------|--|------------------|
| 293. | Mohamad Harjono Kartohadiprodjo | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 294. | Muhammad A.S. Hikam | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 295. | Muhammad bin Mochdar Basyir | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 296. | Setyatiti | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 297. | Sumartono Suwandi | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 298. | Tatik Samiatin Nutkiyatin | Warga Masyarakat | Masyarakat Sipil |
| 299. | Dian Fitriana | Yayasan Aksi Insan Mulia | Masyarakat Sipil |
| 300. | Diana Amaliyah V. | Yayasan Dbuku Bakti Bangsa | Masyarakat Sipil |
| 301. | Andreas Harsono | Yayasan Pantau | Masyarakat Sipil |
| 302. | Mamoto Gultom | Yayasan Pelangi Kasih Nusantara | Masyarakat Sipil |
| 303. | Lutfi Rahman | Yayasan Pendidikan Bumi Kartini Jepara | Masyarakat Sipil |